

SKRIPSI

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG
PANJANG**

**(Studi Kasus Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2023/PN.Pdp dan
80/Pid.Sus/2023/PN.Pdp)**

***Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***

OLEH :

SILVI AULIA PUTRI

2110117002

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

**Tenofrimer, S.H., M.Si.
Diana Arma, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2025

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG
PANJANG (Studi Kasus Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/2023/PN.Pdp dan
80/Pid.Sus/2023/PN.Pdp)**

(Silvi Aulia Putri, 2110117002, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Hukum
Pidana, 98 halaman, 2025)

ABSTRAK

Disparitas putusan pidana adalah perbedaan hukuman terhadap perkara yang sejenis tanpa dasar pembenaran yang jelas, yang berpotensi mencederai prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Fenomena ini umum terjadi dalam praktik peradilan di Indonesia, termasuk dalam perkara tindak pidana narkoba yang memiliki regulasi tegas namun ruang diskresi hakim yang luas. Penelitian ini mengkaji disparitas dalam dua putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang, yaitu Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp dan 80/Pid.Sus/2023/PN Pdp, yang menunjukkan perbedaan pidana terhadap dua terdakwa yang didakwa dengan pasal yang sama, yakni Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: 1. Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana narkoba pada Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Pdp dan 80/Pid.Sus/2023/PN.Pdp di Pengadilan Negeri Padang Panjang? 2. Apakah terjadinya disparitas putusan hakim dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Pdp dan 80/Pid.Sus/2023/PN.Pdp di Pengadilan Negeri Padang Panjang dapat membawa implikasi terhadap masalah keadilan? Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris melalui wawancara dengan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis dan non-yuridis, yang menyebabkan disparitas pembedaan. Kurangnya kejelasan dalam pembobotan peran pelaku dalam struktur tindak pidana, khususnya antara *intellectual dader* dan *material dader*, menjadi kelemahan dalam penerapan hukum. Disparitas putusan ini dapat memengaruhi pencapaian keadilan substantif, di mana meskipun penjatuhan pidana telah memenuhi ketentuan hukum positif, perbedaan yang tidak seimbang dalam hukuman menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan keadilan. Oleh karena itu, perlunya pedoman yang jelas dalam penjatuhan hukuman menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan yang konsisten dan merata.

Kata Kunci: Disparitas, Putusan Hakim, Narkoba, Keadilan, Hukum Positif, Pembedaan.

**DISPARITY OF JUDGES' DECISIONS ON NARCOTICS CRIMES IN THE
JURISDICTION OF THE PADANG PANJANG DISTRICT COURT (Case
Study of Decision Number: 78/Pid.Sus/2023/PN.Pdp and
80/Pid.Sus/2023/PN.Pdp)**

*(Silvi Aulia Putri, 2110117002, Faculty of Law, Andalas University, Criminal Law,
98 pages, 2025)*

ABSTRACT

Disparity in criminal decisions is the difference in punishment for similar cases without clear justification, which has the potential to harm the principles of justice and equality before the law as mandated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution. This phenomenon is common in judicial practice in Indonesia, including in narcotics crime cases which have strict regulations but broad discretionary space for judges. This study examines the disparity in two decisions of the Padang Panjang District Court, namely Decision Number 78/Pid.Sus/2023/PN Pdp and 80/Pid.Sus/2023/PN Pdp, which show differences in criminal penalties for two defendants charged with the same article, namely Article 114 paragraph (2) in conjunction with Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The problem formulation in this study includes: 1. What is the basis for the judge's consideration in issuing a verdict in a narcotics crime case in Decision Number 78/Pid.Sus/2023/PN.Pdp and 80/Pid.Sus/2023/PN.Pdp at the Padang Panjang District Court? 2. Does the disparity in the judge's decision in Decision Number 78/Pid.Sus/2023/PN.Pdp and 80/Pid.Sus/2023/PN.Pdp at the Padang Panjang District Court have implications for justice issues? The research was conducted with a normative juridical approach supported by empirical data through interviews with judges. The results of the study indicate that the judge's considerations include both juridical and non-juridical aspects, which cause disparities in sentencing. The lack of clarity in weighting the perpetrator's role in the structure of the crime, especially between intellectual father and material father, is a weakness in the application of the law. This disparity in sentencing can impact the achievement of substantive justice. Even if sentencing complies with positive law, the disproportionate difference in sentencing indicates a gap in the application of justice. Therefore, the need for clear guidelines for sentencing is crucial to ensure consistent and equitable justice.

Keywords: Disparity, Judicial Decisions, Narcotics, Justice, Positive Law, Criminalization.